

25 Tahun Nggak Jelas Juntrungannya

Rakyat Merdeka, 7 Mei '98.

Kasus Marsinah Kudu Dituntaskan

Pada 8 Mei besok, kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah akan genap 25 tahun. Marsinah ditemukan tewas mengenaskan pada 8 Mei 1993 di Sidoarjo, Jawa Timur. Penegakan hukum ini masih dipenuhi rekayasa kasus, belum menyentuh pelaku utama.

PADA 8 Mei besok, kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah akan genap 25 tahun. Marsinah ditemukan tewas mengenaskan pada 8 Mei 1993 di Sidoarjo, Jawa Timur. Penegakan hukum ini masih dipenuhi rekayasa kasus, belum menyentuh pelaku utama.

Jelang peringatan 25 tahun kasus Marsinah, sejumlah aktivis perempuan mendesak pemerintah menuntaskan kasus tersebut. Pengacara publik Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pratiwi Febry menuturkan, Marsinah ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 di Sidoarjo, Jawa Timur, setelah hilang selama tiga hari.

Buruh PT Catur Putera Surya itu hilang setelah memimpin unjuk rasa menuntut kenaikan upah buruh, upah lembur, fasilitas kerja, dan cuti hamil bagi buruh perempuan. Aksi tersebut dilakukan setelah terbitnya peraturan Gubernur Jawa Timur yang

mengimbau pengusaha menaikkan gaji buruh hingga 20 persen gaji pokok.

Pratiwi menilai, pemerintah seolah menutup kasus Marsinah dan menganggap selesai dengan tidak menindaklanjuti fakta-fakta dan temuan dalam persidangan. "Kasus Marsinah menjadi salah satu gambaran penegakan hukum dan peradilan di Indonesia yang diwarnai rekayasa dan kepalusuan," katanya di Jakarta.

Dalam kasus Marsinah, bos PT Catur Putera Surya dihukum 17 tahun penjara, dan seorang staf yang terlibat ikut divonis 12 tahun. Belakangan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutus mereka bebas dari segala dakwaan.

Pemerintah sendiri mengabaikan banyak fakta dan temuan persidangan pada waktu itu yang masih bisa diusut untuk mencari siapa pelaku dan aktor intelektual sesungguhnya. Pratiwi menyebutkan, desakan penuntasan kasus Marsinah juga ditujukan kepada Komnas HAM.

"Kasus ini dibuka kembali agar bisa dibawa ke jalur hukum yang nantinya bisa dibuka dalam persidangan HAM," ujarnya. Dia menekankan, kasus Marsinah bukan hanya soal kriminalitas. Tapi juga soal perjuangan warga negara, perempuan, dan buruh yang dirampas haknya oleh negara.

Berbagai bahan dan bukti untuk mengungkap kasus Marsinah

sebagai kejahatan HAM sebenarnya masih bisa ditemukan. Hal ini diungkap Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ellena Ekarahend. Pihaknya menuntut pemerintah agar mengakui kasus Marsinah sebagai kasus kejahatan HAM.

"Sekarang yang dibutuhkan adalah keberanian dan komitmen untuk menggunakannya bagi penuntasan kasus. Dengan peringatan 25 tahun kasus Marsinah ini, kami mendesak pemerintah bisa menyelesaikan kasus ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ingat, Indonesia masih punya pekerjaan rumah," ujar Ellena. ■ OSP